

**PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN)
DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS
KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains(M.Si)
Pada
Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YUANITA PERMATA ADI
07012682327027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nama Mahasiswa : YUANITA PERMATA ADI

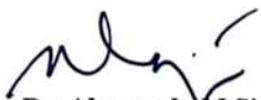
NIM : 07012682327027

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,


Dr. Andy Alfatih, M.P.A.
Pembimbing Pertama


Dr. Alamsyah, M.Si.
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

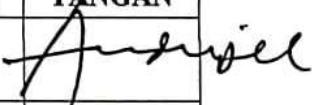

Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003



HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nama Mahasiswa : Yuanita Permata Adi
NIM : 07012682327027
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 8 Januari 2025

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Andy Alfatih, M.P.A.	Ketua	
2	Dr. Alamsyah, M.Si	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Wahyuningrat, M.Si	Anggota	
4	Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.	Anggota	
5	Dr. Andries Lionardo, M.Si.	Anggota	
6	Dr. Atriqa Iriani, M.Si	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

Palembang, Januari 2025
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuanita Permata Adi
NIM : 07012682327027
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 29 Agustus 1990
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025

Menyatakan,



Yuanita Permata Adi
NIM. 07012682327027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuanita Permata Adi
NIM : 07012682327027
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non exclusive Royalty - Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFektivitas KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2025
Yang Menyatakan,



Yuanita Permata Adi
NIM. 07012682327027

ABSTRAK

PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, Januari 2025

Yuanita Permata Adi ; dibimbing oleh Dr. Andy Alfatih, MPA. Dan Dr . Alamsyah, M.Si.

xxv + 154 halaman, 24 tabel, 18 gambar, 7 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi dalam implementasi kebijikanan satu data di kabupaten organ komering ilir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang menekankan pada analisis data numerik dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian ini terdiri dari 78 ASN yang terlibat dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau sensus. Kuesioner dikumpulkan melalui instrumen yang menggunakan skala Likert. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik motivasi maupun modal sosial ASN memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Modal sosial memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan motivasi, menunjukkan bahwa penguatan kepercayaan, jaringan sosial, dan hubungan kerja sama perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas kolaborasi ASN dan keberhasilan kebijakan publik.

Kata kunci : Motivasi , modal sosial, kolaborasi, analisis multivariat

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CIVIL SERVANT MOTIVATION AND SOCIAL CAPITAL OF CIVIL SERVANTS ON THE EFFECTIVENESS OF CIVIL SERVANT COLLABORATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE ONE DATA INDONESIA POLICY IN OGAN KOMERING ILIR REGENCY

Scientific Paper in the Form of a Thesis, Januari 2025

*Yuanita Permata Adi; supervised by Dr. Andy Alfatih, MPA, and Dr. Alamsyah, M.Si.
xxv + 154 pages, 24 tables, 18 figures, 7 appendices*

This study aims to determine the influence of ASN motivation and social capital on the effectiveness of collaboration in implementing the One Data policy in Ogan Komering Ilir Regency. The research employs a descriptive quantitative approach, focusing on numerical data analysis using multiple linear regression analysis. The study population consists of 78 civil servants (ASN) involved in the implementation of the One Data Indonesia policy in Ogan Komering Ilir Regency, making the sample a saturated sample or census. Questionnaires were collected using instruments based on a Likert scale. The results show that both ASN motivation and social capital significantly influence collaboration effectiveness in the implementation of One Data in Ogan Komering Ilir Regency. Social capital has a greater impact than motivation, suggesting that strengthening trust, social networks, and cooperative norms should be the primary focus to enhance ASN collaboration quality and public policy success.

Keywords: Motivation, social capital, collaboration, multivariate analysis

RINGKASAN

PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, Januari 2025

Yuanita Permata Adi ; dibimbing oleh Dr. Andy Alfatih, MPA. dan Dr. Alamsyah, M.Si.
xxv + 154 halaman, 24 tabel, 18 gambar, 7 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan modal sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap efektivitas kolaborasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah seluruh ASN yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, dengan total 78 responden menggunakan teknik sensus. Data diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert yang mencakup dimensi motivasi, modal sosial, dan efektivitas kolaborasi.

Kebijakan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data. Implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi yang efektif antar ASN, yang dipengaruhi oleh motivasi kerja serta modal sosial mereka. Motivasi ASN mencakup dorongan untuk melayani kepentingan publik dan mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, modal sosial mencakup kepercayaan, jaringan, dan norma kerja sama yang memungkinkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik.

Motivasi ASN didasarkan pada teori kebutuhan Maslow (1943) dan Public Service Motivation (PSM) oleh Perry & Wise (1990). Teori ini menyoroti pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan kinerja ASN. Motivasi publik didefinisikan sebagai orientasi individu untuk melayani kepentingan masyarakat melalui institusi publik.

Modal sosial mengacu pada sumber daya berbasis hubungan sosial yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan (Putnam, 1993). Dalam konteks sektor publik, modal sosial memfasilitasi koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat,

dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara. Alat ukur modal sosial yang komprehensif, seperti *Social Capital Index* oleh Onyx & Bullen (2000), digunakan untuk mengukur dimensi partisipasi komunitas, kepercayaan, hubungan sosial, dan nilai bersama.

Modal sosial ASN juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kolaborasi, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,6758 dan p-value 0,00 (<0,05). Setiap peningkatan satu unit modal sosial akan meningkatkan efektivitas kolaborasi sebesar 0,6758 unit. Modal sosial menciptakan kepercayaan dan norma kerja sama yang memperkuat jaringan antar individu dan organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putnam (1993) dan Onyx & Bullen (2000), yang menekankan pentingnya modal sosial dalam meningkatkan produktivitas kelompok dan efektivitas kolaborasi. Secara simultan, motivasi dan modal sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kolaborasi, dengan nilai R-squared sebesar 66,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut bersama-sama menjelaskan 66,20% variasi dalam efektivitas kolaborasi ASN, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Signifikansi model ini dikonfirmasi melalui uji F dengan p-value sebesar 0,000 (<0,05).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik motivasi maupun modal sosial ASN memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Modal sosial memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan motivasi, menunjukkan bahwa penguatan kepercayaan, jaringan sosial, dan hubungan kerja sama perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas kolaborasi ASN dan keberhasilan kebijakan publik.

SUMMARY

THE INFLUENCE OF CIVIL SERVANT MOTIVATION AND SOCIAL CAPITAL
OF CIVIL SERVANTS ON THE EFFECTIVENESS OF CIVIL SERVANT
COLLABORATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE ONE DATA
INDONESIA POLICY IN OGAN KOMERING ILIR REGENCY

Scientific Work in the Form of a Thesis, January 2025

Yuanita Permata Adi; supervised by Dr. Andy Alfatih, MPA, and Dr. Alamsyah, M.Si.

xxv + 154 pages, 24 tables, 18 figures, 7 appendices

The One Data Indonesia policy aims to integrate data from various ministries, agencies, and local governments to improve data efficiency, accuracy, and accessibility. Implementing this policy requires effective collaboration among civil servants, which is influenced by their work motivation and social capital. ASN motivation includes the drive to serve public interests and achieve organizational goals. Meanwhile, social capital encompasses trust, networks, and norms of cooperation that enable better coordination and collaboration.

ASN motivation is grounded in Maslow's hierarchy of needs (1943) and the Public Service Motivation (PSM) theory by Perry & Wise (1990). These theories highlight the importance of intrinsic and extrinsic motivation in enhancing ASN performance. Public service motivation is defined as an individual's orientation to serve public interests through public institutions.

Social capital refers to resources based on social relationships, including networks, norms, and trust (Putnam, 1993). In the public sector, social capital facilitates coordination, increases citizen participation, and strengthens relationships between government and citizens. Comprehensive social capital measurement tools, such as the Social Capital Index by Onyx & Bullen (2000), assess dimensions like community participation, trust, social relationships, and shared values.

The study uses cross-sectional data analyzed through multiple linear regression. The independent variables are ASN motivation and ASN social capital, while the dependent variable is the effectiveness of ASN collaboration. Classical assumption tests were conducted to validate the model, including normality, multicollinearity, and

heteroscedasticity tests. Results indicate that the model meets the required statistical assumptions.

The analysis reveals that ASN motivation has a positive and significant influence on collaboration effectiveness. With a regression coefficient of 0.3018 and a p-value of 0.027 (<0.05), each one-unit increase in ASN motivation increases collaboration effectiveness by 0.3018 units. This finding aligns with previous studies, such as Esteve et al. (2015), which emphasize that public service motivation enhances teamwork and collective efforts.

ASN social capital also significantly influences collaboration effectiveness, with a regression coefficient of 0.6758 and a p-value of 0.00 (<0.05). Each one-unit increase in social capital improves collaboration effectiveness by 0.6758 units. Social capital fosters trust and cooperative norms that strengthen individual and organizational networks. This finding is consistent with studies by Putnam (1993) and Onyx & Bullen (2000), which underscore the importance of social capital in enhancing group productivity and collaboration effectiveness.

Simultaneously, motivation and social capital significantly influence collaboration effectiveness, with an R-squared value of 66.20%. This indicates that the two variables together explain 66.20% of the variation in ASN collaboration effectiveness, while the remaining percentage is influenced by other unexamined factors. The significance of this model is confirmed through an F-test with a p-value of 0.000 (<0.05).

This study highlights the importance of motivation and social capital in supporting the implementation of the One Data Indonesia policy. ASN motivation, particularly through commitment to public interest and compassion, drives individual initiatives to collaborate. On the other hand, social capital strengthens cross-sectoral trust and cooperation, essential for successful collaboration. However, the study also notes that social capital has a greater influence than motivation on collaboration effectiveness. This underscores the need to prioritize strengthening social capital, such as building networks and cooperative norms, to enhance ASN collaboration. This study employs a quantitative approach, which limits the exploration of other dimensions that may influence ASN collaboration effectiveness. Additionally, external factors such as policies or infrastructure that may affect outcomes were not examined.

This study concludes that both ASN motivation and social capital significantly influence collaboration effectiveness in the implementation of One Data in Ogan

Komering Ilir Regency. Social capital has a greater impact than motivation, suggesting that strengthening trust, social networks, and cooperative norms should be the primary focus to enhance ASN collaboration quality and public policy success.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul **“Pengaruh Motivasi Aparatur Sipil Negara(ASN) Dan Modal Sosial ASN Terhadap Efektivitas Kolaborasi ASN Dalam Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Ogan Komering Ilir”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak **Dr. Andy Alfatih, MPA.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Alamsyah, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II, atas ketulusan dan keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Dalam proses pelaksanaan penggerjaan tesis ini penulis mendapatkan bantuan berupa doa, motivasi, hingga dukungan secara materil dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan seluruh ucapan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan tersebut. Dan dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sekaligus penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Pusbindiklatren Bappenas atas kesempatan dan beasiswa yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya.
2. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Alexsander, S.IP., M.Si., yang telah memberikan dukungan untuk menempuh Pendidikan Magister dan izin tugas belajar kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. dan Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Bapak Dr. Raniansya Putra, S.IP., M.Si., atas segala bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses perkuliahan.

4. Dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat berguna untuk penyempurnaan tesis ini, serta Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat sejak awal perkuliahan hingga selesainya tesis ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Iryandi Chaniago dan Ibu Muaharni, terimakasih untuk semua doanya dan dukungannya selama menjalankan perkuliahan ini.
6. Suami tercinta M. Agung Nur Rizqie dan anak-anakkku tersayang Hanifah Nur Hannah dan Hafiz Nur Hanafi terimakasih untuk semua doa, cinta dan dukungannya.
7. Seluruh teman seperjuangan MAP Bappenas Unsri 2023 yang selalu menemani dalam perjuangan menimba ilmu selama 18 bulan ini.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Atas segala keterbatasan dalam penulisan tesis ini, penulis menyampaikan maaf yang sebesar besarnya. Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dengan harapan agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi sumber kebaikan bagi siapa saja yang memerlukannya.

Indralaya, Januari 2025

Yuanita Permata Adi
NIM. 07012682327027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Palembang pada tanggal 29 Agustus 1990 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Iryandi Chaniago dan Ibu Muharni. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 630 Kota Palembang dan selesai pada tahun 2002. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke MTS Raudhatul Ulum Sakatiga Ogan Ilir dan tamat tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Palembang pada tahun 2008. Di tingkat perguruan tinggi, penulis mengambil jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya dan menyelesaikan studi pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Penulis bergabung menjadi Laboran Fakultas Ilmu Komputer. Penulis memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai Pranata Komputer di Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak Februari 2014, dengan penugasan awal di Bidang Data pada Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Kabupaten(BKKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada Februari 2020, penulis dipromosikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai kasubbid pengelolaan Data dan Statistik Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik. Pada tahun 2023 dan beralih menjadi Fungsional tertentu Pranata Komputer Ahli Muda pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Magister Administrasi Publik, peminatan Kebijakan Publik di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلٰي اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan(QS. Al Imron: 109)”

عن أبي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عَذَّظٌ عَذْبِيَّ بِي، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي، قَدْنَبِي ذَكْرُنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرُنِي فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلِإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْنِي إِلَيْهِ ذَرَاغًا، وَإِنْ تَعْزَّبَ إِلَيَّ ذَرَاغًا تَقَرَّبْنِي إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً،»

Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat.” (HR. Bukhari no. 6970 dan Muslim no. 2675).

“Tesis ini dipersembahkan untuk orang tuaku, suamiku, anak-anakku serta teman-teman perjuangan yang telah menjadi *support system* dalam perjalanan ini. Semoga Allah membalsas segala kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik lagi”

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DRAFT TESIS.....	ii
HALAMAN PE RSETUJUAN KOMISI PENGUJ.....	iii
HAL AMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Perangkat Daerah yang belum menyediakan data secara elektronik	2
1.1.2. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas statistik.....	5
1.1.3. Anggaran penyelenggaraan SDI belum maksimal.....	8
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	14

2.1	Landasan Teori.....	14
2.1.1.	Manajemen Publik	16
2.1.2.	Kedudukan Motivasi dan Modal Sosial Administrasi Publik.....	16
2.2	Efektivitas Kolaborasi Aparatur Sipil Negara(ASN).....	17
2.3	Motivasi Aparatur Sipil Negara(ASN).....	19
2.3.1.	<i>Public Service Motivation (PSM)</i>	19
2.3.2.	<i>Self-Determination Theory (SDT)</i>	20
2.3.3.	Prosocial Motivation.....	20
2.3.4.	Service Orientation	21
2.4	Modal Sosial Aparatur Sipil Negara(ASN).....	21
2.4.1.	Onyx & Bullen(2000)	23
2.4.2.	Robert Putnam (2000).....	24
2.4.3.	Francis Fukuyama (1995)	24
2.5	Pengembangan hipotesis	24
2.5.1	Hubungan motivasi dan kolaborasi.....	24
2.5.1.	Hubungan modal sosial dan kolaborasi	26
2.6	Aparatur Sipil Negara(ASN).....	28
2.7	Satu data	28
2.7.1	Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir	31
2.7.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	31
2.7.3	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32
2.8	Teori yang digunakan.....	33
2.8.1	Motivasi Pelayanan Publik	33
2.8.2	Modal Sosial	34
2.8.3	Kolaborasi	35
2.9	Kerangka Pemikiran.....	36
2.10	Penelitian Terdahulu.....	37

BAB 3	METODE PENELITIAN.....	51
3.1	Desain Penelitian.....	51
3.2	Variabel Penelitian	51
3.3	Definisi dan Konsep	51
3.4	Definisi Operasional.....	55
3.5	Unit Analisis dan Unit Observasi.....	57
3.6	Populasi	57
3.7	Data dan Sumber Data.....	59
3.7.1	Data Primer	59
3.7.2	Data Sekunder.....	59
3.8	Pengujian Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian	59
3.8.1.	Pengujian Validitas Instrumen Penelitian.....	59
3.8.2.	Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian	62
3.9	Teknik Pengumpulan Data	63
3.8.1.	Penyebaran Kuesioner	63
3.8.2.	Observasi Non Partisipan.....	64
3.8.3.	Studi Dokumentasi.....	65
3.10	Konversi Data Ordinal ke Interval.....	65
3.11	Hipotesis Penelitian	65
3.12	Teknik Analisis Data	66
3.11.1.	Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	67
3.11.2.	Teknik Analisis Eksplanatif.....	68
3.11.3.	Uji Asumsi Klasik.....	68
3.11.4.	Analisis univariat	70
3.11.5.	Analisis Multivariat (Analisis Regresi Linier Berganda)	70
3.13	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	72
BAB 4	GAMBARAN UMUM.....	74

4.I.1 Keadaan Alam	74
4.1.2 Kependudukan	75
4.1. Visi dan misi.....	76
4.2.1. Visi Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	76
4.2.2. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika	76
4.2.3. Struktur Organisasi	78
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
5.1. Gambaran umum responden penelitian.....	79
5.1.1. Responden berdasarkan usia	79
5.1.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
5.1.3. Responden Berdasarkan Lama Bekerja	80
5.1.4. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	81
5.2. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif.....	82
5.2.1. Deskripsi Variabel Motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	85
5.2.2. Deskripsi Variabel Modal Sosial ASN	93
5.2.3. Deskripsi Variabel Efektivitas Kolaborasi ASN.....	100
5.3. Analisis Univariat.....	112
5.3.1. Motivasi ASN	112
5.3.2. Modal Sosial ASN	113
5.3.3. Efektivitas Kolaborasi ASN.....	114
5.4. Analisis Bivariat.....	115
5.4.1. Motiviasi ASN dan efektivitas Kolaborasi ASN	115
5.4.2. Modal Sosial ASN dan efektivitas Kolaboras ASN	116
5.1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	117
5.3.1. Hasil Uji Normalitas	117
5.3.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	118
5.3.3. Hasil Uji Multikolinieritas	119

5.2. Analisis Multivariat (Regresi Linier Berganda).....	119
5.4.1. Uji Hipotesis	120
5.5. Pembahasan Hasil Penelitian	125
5.5.1. Pengaruh Motivasi ASN terhadap Efektivitas Kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten OKI	125
5.5.2. Pengaruh Modal Sosial ASN terhadap Efektivitas Kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten OKI	126
5.5.3. Pengaruh Motivasi ASN dan Modal Sosial ASN terhadap Efektivitas Kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten OKI....	127
5.6. Implikasi Penelitian	132
5.6.1. Implikasi Teoritis	132
5.6.2. Implikasi Praktik.....	132
BAB 6 PENUTUP	135
6.1. Kesimpulan.....	135
6.2. Keterbatasan Penelitian	136
6.3. Saran.....	136
6.2.1. Saran teoritis	136
6.2.2. Saran Praktis	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
KUESIONER PENELITIAN.....	142
HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS.....	149
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA DAN UJI ASUMSI KLASIK ...	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	5
Tabel 1-2 Tabel Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	9
Tabel 2-1 Tugas Penyelenggara SDI di Kabupaten OKI.....	31
Tabel 2-2 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3-1 variabel penelitian	55
Tabel 3-2 Responden Penelitian, diolah oleh penulis 2024.....	58
Tabel 3-3 Hasil uji validitas instrumen penelitian variabel motivasi ASN	60
Tabel 3-4 Hasil uji validitas instrumen penelitian variabel efektivitas kolaborasi ASN	61
Tabel 3-5 Tabel skala likert	64
Tabel 5-1 Distribusi Frekuensi Responden menurut Jenis kelamin.....	80
Tabel 5-2 Kriteria penilaian berdasakan rata-rata skor (analisis deskriptif).....	83
Tabel 5-3 Keinginan Membuat kebijakan.....	85
Tabel 5-4 Menjadi Aktor dalam implementasi kebijakan.....	86
Tabel 5-5 3. Manfaat Kebijakan.....	87
Tabel 5-6 Kesadaran terhadap pelayanan publik	87
Tabel 5-7 Kepentingan pelayanan publik	88
Tabel 5-8 Kepentingan Komunitas di atas kepentingan pribadi	89
Tabel 5-9 Empati.....	90
Tabel 5-10 Saling bergantung.....	91
Tabel 5-11 Simpati.....	91
Tabel 5-12 Pengorbanan pencapaian pribadi	92
Tabel 5-13 Mean variabel Motivasi ASN.....	93
Tabel 5-14 Tolong Menolong	94
Tabel 5-15 Kehadiran	94
Tabel 5-16 Keaktifan	95
Tabel 5-17 Rasa memiliki.....	96
Tabel 5-18 Rasa Aman.....	96
Tabel 5-19 Kehadiran SDM yang handal	97
Tabel 5-20 Meminta pertolongan.....	98
Tabel 5-21 Meminta Informasi kepada sesama Rekan dalam SDI.....	98
Tabel 5-22 Diskusi	99

Tabel 5-23 Mean variabel modal sosial	100
Tabel 5-24 Menghargai Keputusan.....	101
Tabel 5-25 Berbagi opini dan solusi	102
Tabel 5-26 Pemahaman peran dan tanggung jawab organisasi sebagai anggota kolaborasi	103
Tabel 5-27 Kolaborasi berfungsi dengan baik	104
Tabel 5-28 Sepakat mengenai tujuan kolaborasi.	105
Tabel 5-29 Penggunaan sumber daya bersama untuk mendapat manfaat dari kolaborasi.	105
Tabel 5-30 Berbagi informasi untuk memperkuat operasi dan program kegiatan KLD lainnya.....	106
Tabel 5-31 Saling menghargai dan menghormati dalam kolaborasi	107
Tabel 5-32 Pencapaian tujuan kolaborasi lebih baik.	107
Tabel 5-33 Bekerja melalui perbedaan untuk mencapai solusi win-win	108
Tabel 5-34Kepercayaan pada mitra kolaborasi.....	109
Tabel 5-35 Organisasi saya dapat mengandalkan setiap organisasi mitra untuk memenuhi kewajibannya terhadap kolaborasi.	110
Tabel 5-36 Organisasi Anda merasa bahwa tetap bekerja dengan organisasi mitra lebih berharga daripada meninggalkan kolaborasi.	110
Tabel 5-37 Mean variabel kolaborasi ASN	111
Tabel 5-38 Hasil Uji Normalitas data	118
Tabel 5-39 Hasil Uji Heterokedasitas	119
Tabel 5-40 Hasil Uji Multikolinieritas.....	119
Tabel 5-41 hasil regresi linier berganda.....	119
Tabel 5-42 Hasil Uji T(T-test) variabel Motivasi ASN	121
Tabel 5-43 Hasil Uji T(T-test) variabel Modal Sosial ASN	122
Tabel 5-44 Hasil Uji F (F-test).....	123
Tabel 5-45 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R-Square</i>)	124
Tabel 5-46 Matriks Hasil penelitian	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Tampilan Halaman Muka aplikasi SDI Pemkab. OKI	3
Gambar 1-2 Indeks Penyelenggaraan Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	4
Gambar 1-3 Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika	6
Gambar 2-1 Gambaran Umum Satu Data Indonesia	29
Gambar 2-2 Penyelenggara Satu Data Indonesia.....	30
Gambar 2-3 Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS.....	33
Gambar 2-4 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3-1 Kerangka Hipotesis.....	66
Gambar 4-1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ilir	75
Gambar 4-2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	78
Gambar 5-1 Frekuensi responden berdasarkan usia	79
Gambar 5-2 Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin	80
Gambar 5-3 Distribusi Frekuensi Responden menurut masa kerja	80
Gambar 5-4 Distribusi Frekuensi Responden menurut Pendidikan.....	81
Gambar 5-5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Konsultasi Peng-input-an Portal Satu Data Ogan Komering Ilir, https://data.kaboki.go.id	89
Gambar 5-6 Distribusi Motivasi ASN	112
Gambar 5-7 Distribusi Modal Sosial ASN	113
Gambar 5-8 Distribusi Efektivitas Kolaborasi ASN.....	114
Gambar 5-9 Scatter Plot: Motivasi ASN dan Efektivitas Kolaborasi ASN	115

DAFTAR SINGKATAN

ASM	: Aparatur Sipil Negara
APM	: <i>Attraction to policy making</i>
Bappeda	: Badan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
COMM	: <i>Commpassion</i>
CPI	: <i>Commitment to Public Interest</i>
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
EPSS	: Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
EG	: <i>E-Government</i>
OKI	: Ogan Komering Ilir
PSM	: <i>Public Service Motivation</i>
SDT	: <i>Self Determination Theory</i>
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: <i>Self Sacrife</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah sebuah bentuk kesadaran pemerintah Indonesia akan pentingnya mengintegrasikan dan menyatukan berbagai data yang dimiliki oleh Kementerian, Lembaga, Dinas dan Instansi (K/L/D/I) di semua tingkatan dari pusat hingga daerah sehingga terpusat dan terkelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data bagi pemangku kepentingan, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang membutuhkan akses informasi dari pemerintah. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 Tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan :

- “a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;*
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;”*

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan proses kolaborasi antar pihak dalam mencapai tujuan SDI yang diharapkan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki peran sebagai pembina, walidata, forum data, dan produsen data. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) telah menetapkan peraturan Bupati No 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia yang menunjuk Badan Pusat Statistik(BPS) sebagai Pembina Data, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) sebagai Ketua Forum Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dan Perangkat Daerah sebagai wali data pendukung serta Produsen Data(Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Satu Data, 2021).

Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang belum menyediakan data secara elektronik;
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas statistik; dan
- c. Anggaran penyelenggaraan SDI belum maksimal;

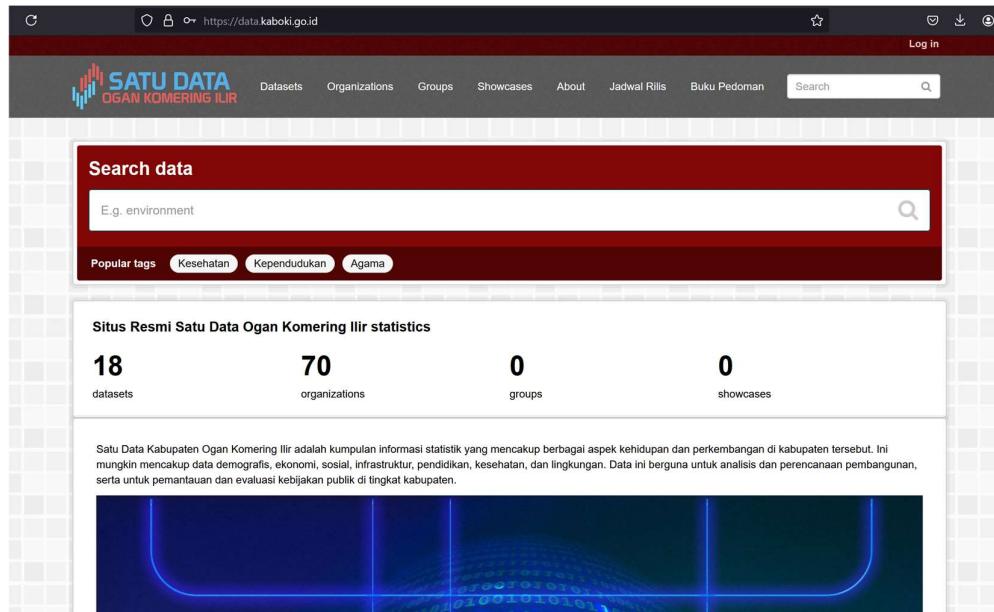
Itulah alasan-alasan pemilihan judul penelitian ini. Alasan-alasan tersebut akan diuraikan secara panjang lebar disertai data seperti dibawah ini:

1.1.1. Perangkat Daerah yang belum menyediakan data secara elektronik

Aplikasi Umum adalah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah sedangkan aplikasi khusus merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukankebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. (Pemerintah Pusat, 2018). Berdasarkan data dari bidang *E-Governance* Dinas Komunikasi Informatika, Pemerintah Kabupaten OKI memiliki sekitar 10 penggunaan aplikasi umum , 138 aplikasi khusus yang digunakan oleh 38 Perangkat Daerah serta 53 domain website yang digunakan oleh Dinas/Badan/kantor, kecamatan dan RS. Aplikasi digunakan bertujuan mendukung pelayanan publik.

Portal data diharapkan berfungsi sebagai pusat data yang terintegrasi, menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Dengan adanya portal ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dapat ditingkatkan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Melalui data.kaboki.go.id, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis data sektoral yang telah disusun dan dikelola sesuai dengan standar SDI, sehingga memastikan kualitas dan konsistensi data yang disajikan. Namun belum semua perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu menyediakan data secara elektronik, hal ini menghambat proses integrasi data dan mengurangi efisiensi dalam pengelolaan data(Safaria et al., 2019). Kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan data yang akurat dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tanpa data yang mudah diakses, masyarakat akan kesulitan memantau kebijakan dan program pemerintah, sehingga menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan berbasis data akan

menurun, karena mereka tidak memiliki data yang valid untuk mendukung pandangan dan aspirasi publik. Selanjutnya, Ketidakpatuhan terhadap standar Satu Data Indonesia (SDI) dapat mengakibatkan data yang disajikan tidak konsisten atau tidak akurat, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Jika data tidak disusun dan dikelola dengan baik, pemerintah daerah mungkin mengambil keputusan yang kurang tepat karena tidak didukung oleh data yang kredibel. Hal ini berpotensi mengakibatkan inefisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang tidak efektif, sehingga menghambat upaya pembangunan daerah secara keseluruhan.



Gambar 1-1 Tampilan Halaman Muka aplikasi SDI Pemkab. OKI

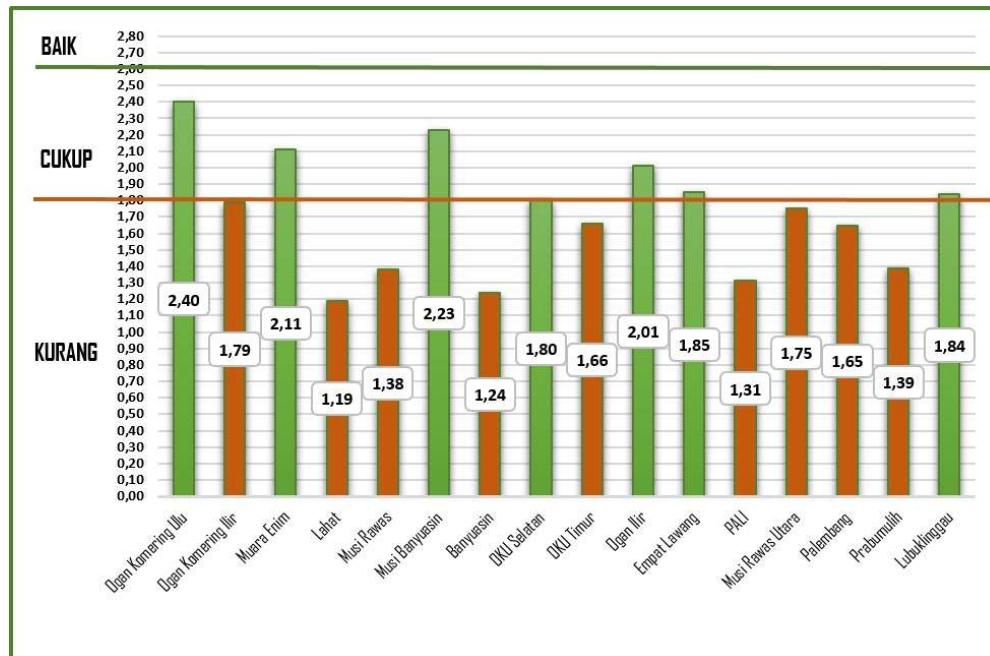
Sumber : Data.kaboki.go.id(diakses 17 Juli 2024)

Melalui home page portal Satu Data dapat dilihat dari 70 organisasi baru terdapat 18 data set sehingga tergambar data sektoral yang dimiliki oleh Perangkat Daerah belum disebarluaskan melalui media elektronik. Hal ini didukung oleh keyakinan perangkat daerah dalam menyediakan data dalam portal Satu Data Indonesia yang menjadi aspek kepercayaan dalam berkolaborasi.

Pentingnya motivasi Pemerintah Daerah dalam menyediakan infrastruktur Satu Data Indonesia dalam memenuhi kebutuhan data publik. Isu tersebut menghambat proses integrasi antarlayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pelayanan.

Permasalahan perbedaan platform, ego sektoral, serta mekanisme data interoperability tidak dapat dipecahkan hanya dengan teknologi, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung kegiatan dimaksud Gryseels et. al. (2015) (Islami, 2021).

Untuk mencapai tujuan Satu Data Indonesia dibutuhkannya evaluasi yang mengukur ketercapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga BPS sebagai Pembina Data melakukan evaluasi secara berkala sejak Tahun 2022. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilakukan BPS terhadap Pelaksanaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah , Kabupaten OKI tahun 2023 mendapatkan nilai 1,79 dari 5 dengan indeks predikat “kurang”(BPS, 2024). Dengan nilai tertinggi 2,4 yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu dan yang nilai terendah 1,19 yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat. Penilaian tersebut dirincikan sebagai berikut :



Gambar 1-2 Indeks Penyelenggaraan Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Namun nilai di atas jauh berbeda, berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, Kabupaten Ogan Komering

Ibir (OKI) berhasil memperoleh nilai indeks sebesar 3,04 dengan predikat BAIK. Prestasi ini menempatkan Kabupaten OKI sebagai kabupaten dengan nilai tertinggi kedua di Sumatera Selatan, setelah Kota Prabumulih. Capaian ini diharapkan dapat mempercepat partisipasi OKI dalam mendukung transformasi menuju pemerintahan digital yang efisien dan responsif di Indonesia sebagaimana diharapkan dapat menopang Satu Data Indonesia. Namun hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten OKI telah berhasil dalam implementasi SPBE, terdapat kekurangan signifikan dalam penyelenggaraan statistik.

1.1.2. Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas statistik

Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kapasitas dalam bidang statistik menjadi kendala utama dalam pengelolaan data sektoral, menghambat upaya memastikan kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan dan dianalisis.

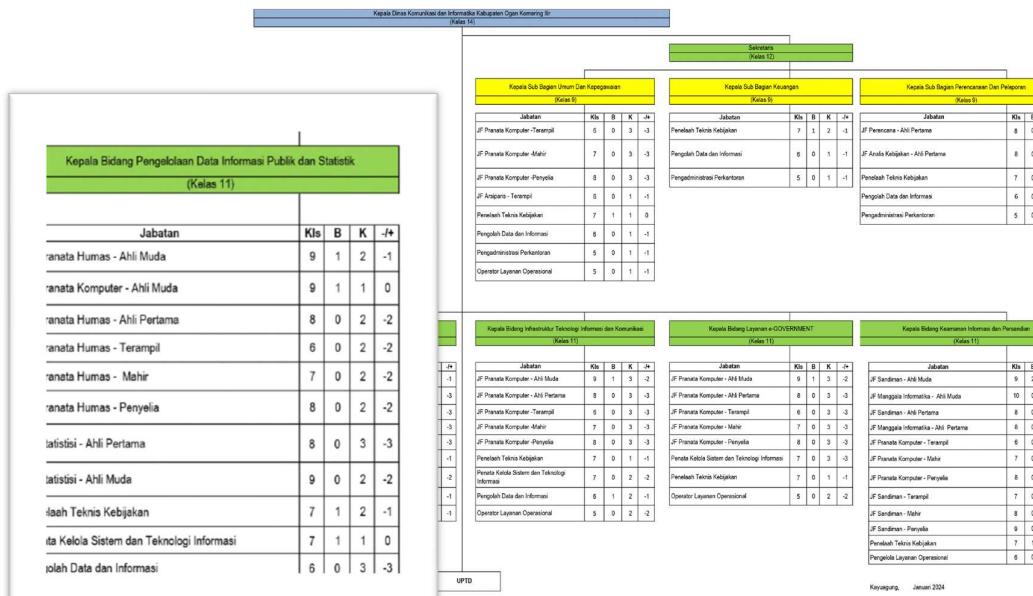
Tabel 1-1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,74
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,79
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,20
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,00
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,79

Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1-1 , Hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) tahun 2023, hasil penilaian domain Prinsip SDI sebesar 1,50 yang artinya penerapan prinsisp-prinsip SDI belum secara menyeluruh meliputi standar data, metadata, interopabilitasan data,dan kode referensi data. Rendahnya nilai indeks ini terutama pada domain Prinsip satu data dan mengindikasikan perlunya pemahaman konsep SDI dan perbaikan dalam pengelolaan data, termasuk penerapan standar data dan metadata yang lebih konsisten pada tahap perencanaan data(Islami, 2021), serta peningkatan akurasi, relevansi, aksesibilitas, dan konsistensi data terutama pada penyebarluasan data. Penyediaan kebutuhan akan data melalui portal data

secara otomatis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi publik melalui Portal Satu Data Indonesia (SDI) (Suryahadi, 2022).



Gambar 1-3 Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI

Sebagai perangkat daerah yang diberi wewenang urusan statistik di tingkat kabupaten/kota, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peran sentral dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi, penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi tanggung jawab Diskominfo. Namun, dalam praktiknya, banyak Diskominfo di kabupaten/kota belum memiliki jabatan fungsional statistisi dalam peta jabatan yang tersedia. Pada Gambar 1-3 Peta Jabatan, Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik memiliki kebutuhan Statistisi Ahli Pertama 3 orang dan Statistisi Ahli Muda 2 orang namun belum tersedia pada tahun 2024.

Dalam memastikan kegiatan statistik berjalan sesuai standar, penyelenggaraan statistik sektoral memerlukan tenaga profesional dengan kompetensi di bidang statistik untuk melaksanakan tugas seperti pengumpulan data, analisis, pengolahan metadata, hingga diseminasi informasi.

Menurut Safaria et al. (2019) salah satu kesenjangan dalam implementasi Satu Data Indonesia adalah sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan data di instansi pemerintahan daerah mencakup dua aspek utama. Pertama, keaktifan pengelola data masih belum merata di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Banyak SKPD belum memiliki pengelola data yang aktif dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, belum ada sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan terukur, serta belum tersusun rancangan penilaian dan monitoring kinerja untuk SKPD. Hal ini berarti evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas kerja pengelola data belum dilakukan secara sistematis, yang menghambat upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Kedua, keterampilan teknis (hardskill) pengelola data sektoral juga menjadi kendala. Tidak semua pengelola data memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan alur kerja pengelolaan data secara efektif. Keterampilan teknis yang diperlukan mencakup penggunaan perangkat lunak pengelolaan data, analisis data, serta pemahaman terhadap standar dan prosedur pengelolaan data. Kekurangan keterampilan ini dapat menghambat optimalisasi pengelolaan data dan berdampak negatif pada kualitas data yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan berbasis data yang tepat dan akurat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya peningkatan keaktifan dan komitmen pengelola data di seluruh SKPD melalui penyusunan dan penerapan sistem penilaian dan monitoring kinerja yang terstruktur. Selain itu, perlu diadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis bagi pengelola data sektoral agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan aktor yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dapat berdampak signifikan pada efektivitas dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip serta tata kelola data yang baik. Berdasarkan penelitian Islami (2021), Salah satu masalah utama adalah penerapan standar data dan metadata yang tidak konsisten, khususnya selama tahap perencanaan data. Ketika aktor-aktor ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai standar yang diperlukan, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapannya. Akibatnya, data yang dihasilkan menjadi kurang

akurat, tidak relevan, dan tidak konsisten, yang dapat mengganggu upaya dalam mencapai tata kelola data yang efektif dan terpercaya.

Suryahadi (2022) menekankan bahwa penyediaan data yang akurat dan relevan melalui portal data sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi informasi publik. motivasi para aktor ini sangat diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan data, menerapkan standar yang konsisten, dan memastikan bahwa informasi yang disediakan melalui SDI dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

1.1.3. Anggaran penyelenggaraan SDI belum maksimal

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas data serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Satu Data Indonesia (SDI). Alokasi dana yang terbatas berimplikasi pada beberapa aspek penting, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, implementasi teknologi terbaru, pengembangan kebijakan dan pedoman, pemberian insentif untuk kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, proses kolaboratif dalam berbagi dan mengakses data menjadi kurang efektif, sehingga berdampak pada integrasi dan interoperabilitas data antarinstansi.

Minimnya anggaran juga menyebabkan kurangnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang statistik dan manajemen data. Selain itu, keterbatasan dana menghambat adopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Tanpa teknologi yang mutakhir, proses pengolahan dan analisis data menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas data. Hal ini diperparah dengan kurangnya insentif bagi para pengelola data untuk mendukung tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan prinsip SDI, seperti yang diungkapkan oleh Ansell & Gash (2008). Mereka menekankan bahwa insentif diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, legitimasi, dan kredibilitas dalam kolaborasi antarinstansi serta memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan.

Tabel 1-2 Tabel Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Anggaran 2024
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Rp 74.980.000	
Kab/Kota	
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 40.000.000
2 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 25.000.000
3 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 9.980.000
4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-
5 Pengembangan Infrastruktur	-
6 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKI, data diolah

Berdasarkan data anggaran tahun 2024, alokasi sebesar Rp 74.980.000 hanya mampu mendukung tiga dari enam subkegiatan dalam program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yaitu koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan metadata statistik sektoral. Adapun kegiatan lain, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyelenggaraan otorisasi statistik sektorai belum dapat direalisasikan. Padahal, kegiatan tersebut sangat penting untuk menyediakan jaringan dan penyimpanan data yang cukup besar, yang menjadi kebutuhan utama dalam mendukung integrasi data antarinstansi sesuai prinsip SDI.

Dalam konteks implementasi SDI, dukungan penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota menjadi sangat penting. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi yang baik memastikan data yang dihasilkan konsisten, terintegrasi, dan dapat diandalkan, sesuai prinsip SDI, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan penguatan kelembagaan yang efektif, diharapkan implementasi Satu Data Indonesia dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi hambatan utama dalam implementasi SDI, padahal kolaborasi yang efektif antarinstansi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan data. Perbedaan data yang dimaksud seperti perbedaan data pengguna KB yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan dan DPPKB. Hal ini disebabkan perbedaan konsep dan definisi dari data yang dikumpulkan oleh masing-masing instansi. Perbedaan dan ketidakcocokan data antara tingkat daerah dan pusat mengakibatkan kesulitan dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, menunjukkan perlunya standar yang lebih ketat dan penerapan prosedur yang seragam dalam pengelolaan data. Adanya perbedaan data di tingkat kabupaten dengan provinsi atau pusat disebabkan data belum melalui proses verifikasi dengan lembaga vertikalnya. Seperti di kabupaten data harus rilis pada bulan februari tapi verifikasi dengan vertikal baru di bulan maret. Diperlukan adanya mekanisme untuk melakukan pemeriksaan data sebelum rilis. Untuk mencapai tujuan Satu Data Indonesia, diperlukan juga nilai-nilai modal sosial seperti kepercayaan dan komitmen dari setiap instansi yang terlibat. Interaksi yang baik antar instansi akan membangun ikatan yang kuat, yang pada akhirnya akan memperkuat kolaborasi dan memastikan bahwa kepentingan bersama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Menurut Prabujaya et al., (2023) permasalahan yang menghambat implementasi Satu Data Indonesia di Sumatera Selatan ada beberapa hal, yaitu: Pertama, komunikasi yang transparan antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data. Ini termasuk produsen data, pengguna data, dan pengelola portal data. Kedua, jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola data serta pembaruan pada fasilitas operasional, seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, perlu dilakukan penguatan kompetensi dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pembagian tugas di tim pengelolaan satu data. Keempat, SOP ini akan memberikan panduan yang jelas dan terstandar dalam menjalankan tugas-tugas terkait pengelolaan data. Terakhir, reward dan punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi produsen data. OPD yang berprestasi dalam menghasilkan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu perlu diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi standar harus mendapatkan teguran atau sanksi.

Menurut Safaria et al., (2019) SDI merupakan kerjasama antara berbagai pihak dan pemangku kepentingan (masyarakat, sektor swasta, LSM) dari tahap inisiasi hingga pelaksanaannya. Proses Kolaborasi memungkinkan berbagai instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data secara efektif. Selain itu Emerson & Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa pemerintahan yang kolaboratif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang beragam. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008, yang mensyaratkan pemerintah menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik.

Berdasarkan uraian permasalahan dan data sebelumnya. Maka penelitian ini perlu dilakukan mengenai “PENGARUH MOTIVASI APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DAN MODAL SOSIAL ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KOLABORASI ASN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah motivasi ASN berpengaruh terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apakah modal sosial ASN berpengaruh terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Apakah motivasi ASN dan modal sosial ASN berpengaruh secara bersamaan(simultan) terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam Implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
4. Berapa besar pengaruh motivasi ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
5. Berapa besar pengaruh modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

6. Berapa besar pengaruh motivasi ASN dan modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ASN dan modal sosial ASN secara bersamaan(simultan) terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi ASN dan modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis terkait pengaruh motivasi dan modal sosial ASN terhadap efektivitas kolaborasi ASN dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Secara garis besar, manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang motivasi pelayanan publik, modal sosial, dan kolaborasi antarinstansi, tetapi juga

memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori motivasi dan modal sosial dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor motivasi spesifik yang memengaruhi kolaborasi ASN lintas instansi dan memperluas teori modal sosial dengan menunjukkan bagaimana kepercayaan, jaringan kerja, dan norma kolaborasi dapat mendorong efektivitas implementasi kebijakan Satu Data. Modal sosial yang kuat di antara ASN dapat meningkatkan integrasi data dan kualitas layanan publik, sehingga hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi acuan dalam penerapan kebijakan serupa di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terhadap penguatan kolaborasi antarinstansi dalam implementasi Satu Data Indonesia, seperti pengembangan program/kegiatan pelatihan dan lokakarya yang dirancang khusus untuk meningkatkan motivasi dan modal sosial ASN. Program/kegiatan ini bisa difokuskan pada peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral serta keterampilan teknis dalam pengelolaan data sesuai standar SDI. Selain itu, pemerintah OKI dapat membentuk tim koordinasi lintas instansi dengan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, yang akan memantau dan mendukung keberlanjutan upaya kolaborasi ini. Rekomendasi ini tidak hanya memperkuat integrasi data sektoral, tetapi juga membangun kepercayaan antarinstansi melalui peningkatan modal sosial, yang pada akhirnya akan memperbaiki efisiensi operasional, transparansi, dan akurasi data. Temuan ini juga dapat menjadi pedoman bagi daerah lain yang sedang menerapkan Satu Data Indonesia, sehingga mampu memperkuat implementasi kebijakan melalui pendekatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulai, I. A., Fuseini, M. N., & File, D. J. M. B. (2024). Making cities clean with collaborative governance of solid waste infrastructure in Ghana. *Cleaner Waste Systems*, 8(May), 100150. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2024.100150>
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management-New Strategy for Local Government* (Issue 112). Georgetown University Press.
- Alfatih, A. (2021). *Cara mudah Kerjakan Penelitian Metode Kuantitatif Eksplanatif (Confirmatory) 2 Variabel : X dan Y*. UNSRI Press.
- Alfitri. (2023). *Pengukuran Modal SOSial* (M. Anang Dwi Santoso, S. Ap. & A. M. Maryati (eds.)). Penerbit IDEA Press Yogyakarta.
- BPS Ogan Komering Ilir. (2023). *Ogan Komering Ilir dalam angka*. https://okikab.bps.go.id/publication/2023/02/28/35c563351016b46b71755754/ka_bupaten-ogan-komering-ilir-dalam-angka-2023.html
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metpde Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Darwin;, M., Antonius, M., & Vianitati, R. M. S. A. S. Y. N. H. T. D. S. I. M. D. M. A. B. P. P. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (T. S. Tambunan (ed.); Issue June). Media Sains Indonesia.
- Diaz-Kope, L., & Morris, J. C. (2022). Why collaborate? Exploring the role of organizational motivations in cross-sector watershed collaboration. *Politics and Policy*, 50(3), 516–539. <https://doi.org/10.1111/polp.12470>
- Erik. (2021). *Pengaruh Modal Sosial, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan transformasional terhadap collaborative governance pada program pamsimas di kabupaten enrekang*. STIE NOBEL INDONESIA.
- Esteve, M., van Witteloostuijn, A., & Boyne, G. (2015). The Effects of Public Service Motivation on Collaborative Behavior: Evidence from Three Experimental Games. *International Public Management Journal*, 18(2), 171–189. <https://doi.org/10.1080/10967494.2015.1012573>
- Falahah, Kusumasari, T. F., & Santoso, A. F. (2021). Framework for Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation . *Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*, 207(Issat), 527–533. <https://doi.org/10.2991/aer.k.211106.082>

- FEBRIANTI, B. R. (2022). *MODEL PENGARUH MODAL SOSIAL MAHASISWA TERHADAP MINAT KUNJUNG ULANG (REVISIT INTENTION) YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN MAHASISWA ATAS LAYANAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA* [Universitas Sriwijaya]. <http://repository.unsri.ac.id/85903/>
- Firmansyah, A. D., & Susanto, T. D. (2023). The unsuccessful of Satu Data Indonesia (SDI) implementation: a lesson learned from local government. *Jurnal Mantik*, 7(1), 2685–4236.
- Fukuyama. (1995). Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity. *Free Press*.
- Fukuyama, F. (1998). Social Capital: The Great Disruption. *The Tanner Lectures on Human Values*, 19, 377–484.
- Getha-Taylor, H., & Haddock-Bigwarfe, A. (2014). Public service motivation and willingness to collaborate: An examination in the context of homeland security. *Evidence-Based HRM*, 2(1), 80–95. <https://doi.org/10.1108/EBHRM-07-2013-0018>
- Gray, B. (1989). *collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*.
- Hair, J. F., Page, M., & Brunsved, N. (2019). Business Research for the Twenty-First Century. In *Essentials of Business Research Methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429203374-1>
- Hogan, J., Hogan, R., & Busch, C. M. (1984). How to measure service orientation. *Journal of Applied Psychology*, 69(1), 167–173. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.69.1.167>
- Hood, C. (n.d.). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hyun, Y.-R. (2016). The Impact of Social Capital on Knowledge Sharing and Work Performance of NPOs in Public Web Portals. *International Journal of U- and e-Service, Science and Technology*, 9(10), 351–360. <https://doi.org/10.14257/ijunesst.2016.9.10.32>
- Ilir, P. K. O. K. (2021). *Surat Keputusan Bupati Ogan Komering ilir tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.pdf*.
- Kim, S. (2010). Testing a revised measure of public service motivation: Reflective versus formative specification. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(3), 521–546. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq048>

- Kim, S. (2012). Does Person-Organization Fit Matter in the Public Sector? Testing the Mediating Effect of Person-Organization Fit in the Relationship between Public Service Motivation and Work Attitudes. *Public Administration Review*, 72(6), 830–840. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02572.x>.
- Kurniawan, agung widhi, Puspitaningtyas, Z., & Kurniawan, agung W. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Leisink, P., & Steijn, B. (2009). Public service motivation and job performance of public sector employees in the Netherlands. *International Review of Administrative Sciences*, 75(1), 35–52. <https://doi.org/10.1177/0020852308099505>
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *A Theory of Human Motivation*, Psychological Review, 50, 370-396. <https://doi.org/10.4324/9781912282517>
- Muhammad Noor, Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Murtadho Yusuf, I., Sunu Astuti, R., & Afrizal, D. (2021). *The Role of Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System (A Study on Lane Traffic Accidents in Surabaya)*. 584(Icorsh 2020), 775–781. www.medcom.id
- O’Leary, R., & Bingham, L. B. (2008). The Collaborative Public Manager_ New Ideas for the Twenty-first Century. In *The Collaborative Public Manager* (Issue 112). Georgetown University Press,. %0Awww.press.georgetown.edu
- oh, Y., & Bush, C. B. (2016). Exploring the Role of Dynamic Social Capital in Collaborative Governance. *Administration & Society*, 48(2), 216–236. <https://doi.org/10.1177/0095399714544941>
- Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 36(1), 23–42. <https://doi.org/10.1177/0021886300361002>
- Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Ogan Komering Ilir, (2021).
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data, Pub. L. No. 22 (2021). https://jdih.kaboki.go.id/ProdukHukum/detail_produk?id=41
- Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 6(1), 5–22. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024303>
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. *Wise*

- Source: Public Administration Review, 50(3), 367–373.*
<https://doi.org/10.2307/976618>
- Prabujaya, S. P., Aryansah, J. E., Muhammad, D., & Febriansyah, F. (2023). *Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan*. 4(2), 18–33. <https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.72>
- Priyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. ZIFATAMA PUBLISHING.
- Putnam, R. D. (2016). *Social Capital and Public Affairs Author (s): Robert D . Putnam Source : Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences , Vol . 47 , No . 8 (May , 1994) , Published by : American Academy of Arts & Sciences Stable URL : http://www.jstor.org/stabl. 47(8), 5–19.*
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2150>
- Setiawan, H. (2024). *Pengaruh Literasi Digital dan Modal Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Vokasi*. 13(1), 427–432.
- Steinmo, M. (2015). Collaboration for Innovation: A Case Study on How Social Capital Mitigates Collaborative Challenges in University–Industry Research Alliances. *Industry and Innovation*, 22(7), 597–624. <https://doi.org/10.1080/13662716.2015.1105127>
- Suryahadi, M. F. (2022). Satu data Indonesia (one Indonesian data) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 2023. <https://satikomo.mojokertokota.go.id/>.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes : Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(Special Issues: Collaborative Management), 20–32(13 Pages). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Vangen, C. H.-C. (2005). Managing to Collaborate_ The Theory and Practice of Collaborative Advantage. In *Routledge* (p. 264). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06089-2_4
- Yamin, S. (2023). *Olah Data Statistik: SMARTPLS 3 SMARTPLS 4 AMOS & STATA*. PT Dewangga Energi Internasional.